



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. CHAIRIL ANWAR, MP**
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2016

Pihak Kedua
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ir. H. CHAIRIL ANWAR, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19570501 198503 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

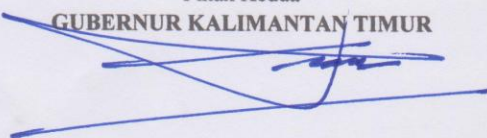
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	Nilai Tambah dari usaha ekonomi produktif masyarakat desa sekitar kawasan hutan	Rp.	1.000.000
2	Berkurangnya luasan lahan kritis pada kawasan hutan dan lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan lahan	Ha	38.750
3	Bertambahnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan	bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	Ha	50
4	Meningkatnya manajemen Pengelolaan Hutan oleh KPH secara mandiri	Persentase tahapan proses menuju KPH yang terkelola secara mandiri	%	10
5	Terwujudnya pengamanan hutan lindung dan hutan produksi di Kaltim	Jumlah Kab/Kota yang mendapat Penanganan gangguan keamanan hutan lindung dan hutan produksi	Kab/Kota	7
6	Meningkatnya prakondisi dan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari	Persentase ketersediaan Data potensi dan kondisi kawasan hutan	%	8,44
7	Meningkatnya peran serta dan akses legal pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Persentase peningkatan ijin/luasan kelola kehutanan masyarakat (HD, HKm, HTR, Kemitraan, Hutan rakyat)	%	10
8	Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial serta daya dukung dan ruang terbuka hijau	Jumlah luasan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kawasan lindung di hutan produksi	Ha	1800
9	Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan serta industri hasil hutan bersertifikat	Bertambahnya jumlah Industri Hasil Hutan	Unit	5
10	Pengembangan Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	Jumlah lokasi usaha pengembangan HHBK atau Jasa Lingkungan	Lokasi	1
11	Terpenuhinya bahan baku berupa kayu untuk industri yang berkesinambungan	Jumlah Bahan Baku Industri	M3	1.000.000
12	Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase perencanaan kehutanan dan pemantapan kawasan hutan	%	40
13	Tersedianya sistem MRV untuk melakukan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) REDD+	Persentase Penurunan Emisi dari Bidang Kehutanan	%	5.07

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 8.315.523.800	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 3.361.771.100	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 358.900.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 505.680.000	APBD
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp 3.271.050.000	APBD
6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan	Rp 699.155.000	APBD
7	Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Rp 566.948.000	APBD
8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp 4.072.010.000	APBD
9	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Rp 1.166.500.000	APBD

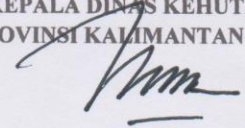
No	Program	Indikator Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
10	Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	Rp 752.560.100	APBD
11	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Rp 950.832.000	APBD
12	Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan	Rp 545.800.000	APBD
13	Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	Rp 472.590.000	APBD
14	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Rp 391.250.000	APBD
15	Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	Rp 1.386.750.000	APBD
16	Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Rp 3.184.260.000	APBD
17	Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat	Rp 113.650.000	APBD
18	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Rp 1.245.200.000	APBD
19	Program Pelestarian kawasan kawasan bernilai ekosistem tinggi	Rp 334.400.000	APBD
20	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Rp 1.691.880.000	APBD
JUMLAH		Rp 33.386.710.003	

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp 5.409.871.000	APBN

Samarinda, Januari 2016

Pihak Kedua
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR


DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS KEHUTANAN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**


H. H. CHAIRIL ANWAR, MP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19570501 198503 1 020